

KERENTANAN RUMAHTANGGA BAJO MANTIGOLA DI TAMAN NASIONAL WAKATOBI

The Vulnerability of Mantigola Bajo Household In Wakatobi Marine National Park

Nur Isiyana Wianti^{1*}, Suriana¹, Taane La Ola¹, Muslim Tadjuddah²

¹Jurusan/P.S. Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO)

²Program Studi Perikanan Tangkap, Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK Universitas Halu Oleo (UHO)

*Email: yanthimuslim@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is for describing vulnerability's typologies by Bajo Mantigola household as a result of the prohibition of fishing activity in Maromaho reef, after the establishment of zonation and regional autonomy as the starting point of marine tourism development in Wakatobi Regency. The research was conducted from March to May 2017, on Bajo fishing community in Mantigola Village, South Kaledupa Subdistrict, Wakatobi Regency, South-east Sulawesi Province. This research was a descriptive study using quantitative research paradigm and supported by qualitative (post-positivistic) research. The results showed that based on a side of human capital, Bajo fisher head of households were a very low formal education. This fact have consequences to Bajo Mantigola households. They can not expand their livelihoods other than capture fisheries activities. In terms of social capital, Bajo fishermen's households are relatively more vulnerable when they related to kaledupa land-dweller who do not provide opportunities for their economic development in Kampung Mantigola. Meanwhile, physical capital side, Bajo Mantigola Kampung is low in economic facilities such as the market, which should be a catalyst for economic development in the village of Bajo Mantigola. These four capital conditions eventually result in vulnerability to economic capital. Low income in the West wind season related to debt traps, consumptive attitudes, and less alternative income. The vulnerability can ultimately lead to illegal fishing practices that damage the environment due to the emergence of livelihood instability. And also, this paper will criticize the role of Bajo identity concerning to vulnerability dimension of The Bajo.

Keywords: Vulnerability, Household, Mantigola Bajo, Wakatobi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui gambaran tipologi kerentanan yang dialami oleh rumahtangga nelayan Bajo di Mantigola akibat dari pelarangan kegiatan penangkapan ikan pada wilayah Karang Maromaho setelah terbentuknya TNKW dan otonomi daerah sebagai starting point pengembangan wisata Bahari di Kabupaten Wakatobi. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2017 di komunitas nelayan Bajo di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan paradigma penelitian kuantitatif dan didukung oleh penelitian kualitatif (post-positivistic). Hasil penelitian menunjukkan dari sisi modal manusia, nelayan Bajo berpendidikan formal sangat rendah sehingga rumahtangga nelayan Bajo Mantigola tidak bisa memperluas mata pencaharian selain kegiatan perikanan tangkap. Dari sisi modal sosial, rumahtangga nelayan Bajo relatif lebih rentan ketika terkait dengan interaksi dengan orang darat, khususnya orang darat Kaledupa yang tidak memberikan peluang bagi berkembangnya perekonomian di Kampung Mantigola. Dari sisi modal fisik, Kampung Bajo Mantigola rendah dalam fasilitas ekonomi antara lain pasar, yang semestinya menjadi katalisator perkembangan ekonomi di kampung Bajo Mantigola. Kondisi empat modal ini akhirnya menghasilkan kerentanan pada modal ekonomi. Pendapatan rendah di musim angin Barat, rentan dengan jebakan hutang, sikap konsumtif, dan kurang alternatif nafkah selain menangkap ikan. Kerentanan pada akhirnya bisa memicu timbulnya perilaku perikanan ilegal yang merusak lingkungan akibat munculnya ketidakstabilan mata pencaharian. Tulisan ini juga mengkritisi peran identitas Bajo terhadap dimensi kerentanan orang Bajo.

Kata Kunci: Kerentanan, Rumahtangga, Bajo Mantigola, Wakatobi

PENDAHULUAN

Kerentanan mengacu pada kecenderungan orang jatuh atau tinggal, di bawah pra-kebutuhan dasar hidup minimal yang telah ditentukan (Dasgupta, 1997; Pritchett *et al.* 2000; Halder dan Husain, 1999; Hashemi, 1997; Rahman, 1995 *dalam* Abustan, 2010). Kerentanan telah didefinisikan secara berbeda didalam beragam area keilmuan (Fussel, 2010; Vincent-Akpu and Annor-Frempong, 2017). Pada dasarnya

kemiskinan dan kerentanan bagai dua sisi mata uang tidak bisa dibedakan. Pengamatan status dari rumah tangga miskin (biasa didefinisikan hanya dengan apakah atau tidak tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga berada di atas atau di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan) merupakan realisasi *ex-post* dari suatu keadaan probabilitas *ex-ante* yang dapat diambil untuk menetapkan tingkat kerentanan rumah tangga. Jadi, memprediksi probabilitas dari kemiskinan bagi rumah tangga dengan berbagai set karakteristik

memperkirakan kerentanan rumah tangga (Chaudhuri *et al.*, 2001 *dalam* Abustan, 2010).

Menurut Chambers (1989) *dalam* Philip dan Rayhan (2004) bahwa kerentanan memiliki dua sisi. Yakni sisi bagian terluar (*external side*) dari resiko, guncangan, dan tekanan yang dihadapi oleh setiap individu. Sementara sisi bagian dalam (*internal side*) merupakan ketidakmampuan bertahan, artinya ketidakmampuan mengatasi tekanan tanpa harus kehilangan sesuatu yang dimiliki. Kehilangan kemudian memberi dampak pada kemampuan fisik seseorang, ketergantungan secara ekonomi dan sosial, dan mengalami tekanan psikologis. Olehnya, Moser (1998) *dalam* Philip dan Rayhan (2004) berpinjak pada konsepsi Chambers tersebut, Moser mengungkapkan bahwa untuk menganalisa kerentanan harus melibatkan identifikasi tidak hanya ancaman melainkan juga ketahanan (*resilience*) atau respon adaptif di dalam menggunakan sisi peluang dari kerentanan tersebut, dan untuk kemudian mengurangi efek negative dari perubahan lingkungan. Sehingga menurut Moser kerentanan sangat erat kaitannya dengan kepemilikan asset. Artinya individu maupun rumahtangga yang memiliki asset lebih dibandingkan yang lainnya cenderung lebih mampu bertahan, dan sebaliknya.

Salah satu komunitas yang rentan mengalami kerentanan jatuh di bawah garis kemiskinan adalah masyarakat pesisir. Mereka yang hidup di pesisir harus menghadapi tekanan perubahan iklim, dan tekanan yang mengganggu kapasitas subsistensi mereka (Monirul Islam, *et al.*, 2014). Menurut Hutomo (1998) *dalam* Siburian dan Haba (2016) bahwa masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, ciri khasnya adalah ketergantungan hidup pada sumber daya laut, lingkungan, iklim, pasar, dan sumberdaya manusia. Masyarakat pesisir banyak memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mereka melakukan aktivitas kesehariannya di kawasan itu.

Populasi masyarakat pesisir di Indonesia diperkirakan mencapai 16,42 juta jiwa, tersebar dan mendiami 8.090 desa. Menurut hasil analisis SMERU, nilai *Poverty Headcount Index* (PHI) rata-rata 0,3241, yang berarti sekitar 32% dari populasi (5,25 juta jiwa) masyarakat pesisir berada pada level di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah bagian dari jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 15,9%. Realitas kemiskinan masyarakat merupakan suatu ironi karena dengan besarnya potensi sumber daya alam yang begitu besar, yang berada di sektor kelautan dan perikanan wilayah Indonesia (Ditjen KP3K 2008 *dalam* Siburian dan Haba, 2016).

Masyarakat nelayan Bajo yang mendiami hampir seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara merupakan aktor utama pengelola sumberdaya di Taman Nasional Wakatobi¹. Sebagian besar merupakan nelayan. Jumlah dari orang Bajo sendiri di Indonesia diperkirakan sekitar 90.000-150.000 jiwa dan mendiami wilayah-wilayah pesisir secara khusus di lima provinsi di Pulau Sulawesi, NTB, dan NTT, yang kesemuanya merupakan penduduk yang tidak memiliki tanah atau landless (Mead dan Lee, 2007 *dalam* Stacey, *et al.*, 2012). Bajo sendiri di Sulawesi Tenggara mendiami pada hampir seluruh wilayah pesisir. Karena kekuatan ingroup orang Bajo begitu kuat, sehingga semua orang Bajo dari pesisir mana pun di Indonesia saling terhubung satu sama lainnya. Jejaring sosial yang sifatnya mengikat ke dalam

tradisional, dan menggantungkan hidupnya nyaris sepenuhnya pada sumberdaya perikanan khususnya Karang Kapota, Karang Kaledupa, dan Karang Karomaho dengan jenis alat tangkap seperti pancing tonda, pancing ikan dasar, pancing cumi-cumi, menangkap dengan panah/tombak, dan menangkap dengan menggunakan jarring (Wianti *et al.*, 2017a).

Namun tidak bisa dipungkiri, nelayan Bajo lekat dengan stigmatisasi sebagai nelayan perusak dan tidak ramah lingkungan; yang menggunakan bahan peledak, dan melakukan pembusukan untuk menangkap ikan yang bernilai ekonomis tinggi di pasar internasional misalnya dalam perdagangan ikan kerapu hidup, dan bagian dari mata rantai perdagangan hasil laut yang dilindungi seperti penyu, ikan napoleon, dan kima (Wianti *et al.*, 2017a).

Sejak penegasan wilayah zonasi taman nasional pada tahun 2007 dan pengembangan kawasan kepulauan Wakatobi sebagai wilayah wisata bahari, nelayan Bajo mengalami keterbatasan akses terhadap sumberdaya alam baik untuk kegiatan nafkah maupun untuk sebagai wilayah ritual khususnya di wilayah zona inti di Karang Karomaho (Wianti *et al.*, 2017a). Semakin terdesak, perlawanan tentu tidak bisa dihindari, meskipun perlawanan bersifat laten atau secara diam-diam dengan cara tetap melakukan kegiatan penangkapan yang dilarang secara sembunyi-sembunyi. Krisis terhadap akses sumberdaya menyebabkan rumahtangga Bajo harus pandai mendayagunakan sumber nafkah lainnya untuk bertahan dari krisis dan tidak jatuh pada kondisi kemiskinan yang kronis. Menurut Bennett dan Dearden (2014) alasan mengapa masyarakat lokal tidak mendukung isu konservasi yang dibawa oleh taman nasional karena taman nasional membatasi akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya yang menjadi basis mata pencaharian, dan masyarakat tidak bisa mengakses keuntungan dari sisi industry pariwisata bahari yang ditawarkan dari diskursus konservasi. Tidak hanya itu saja, institusi yang mengusung isu konservasi tidak mendukung pengembangan budaya, sosial, ekonomi, fisik, dan asset politik masyarakat lokal, sehingga konflik antara pemerintah dan swasta sebagai pengusung diskursus konservasi dan pariwisata dengan masyarakat lokal tidak dapat terhindarkan.

Menurut Ferrol-Schulte *et al.*, (2015) bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengelolaan lingkungan yang dialamatkan pada kerentanan mata pencaharian masyarakat pesisir lebih berdasarkan pada pengembangan kapasitas, dan sampai pada tingkat tertentu terkait kepekaan tanpa cukup terkait tentang paparan, inti dari sebab kerentanan yang dilami oleh masyarakat. Ditambah lagi, kompleksitas, dan inkonsistensi dalam struktur pemerintahan sehingga kebijakan yang dibuat pada level nasional jarang diterima dengan baik untuk memberikan keuntungan bagi komunitas masyarakat di wilayah pesisir. Selanjutnya Ferrol-Schulte *et al.*, (2015) menyampaikan bahwa seharusnya pengelolaan pengurangan kerentanan di dalam pengelolaan wilayah pesisir focus pada identifikasi penyebab dari sumber kerentanan, dan paparan, (Bounding social capital) melekatkan ke"kitan" sesama orang Bajo. Menurut Stacey *et al.*, (2012) Bajo Wakatobi khususnya Mantigola Bajo memiliki jejaring kekerabatan yang kuat khususnya dengan orang-orang Bajo di Pepela dan Oenggai di Pulau Roti, Pulau Kera, juga mendiami teluk Sulamu dan teluk Kupang.

dibandingkan menyembuhkan gejala kerentanan itu sendiri.

Tulisan ini akan menguraikan kerentanan yang dialami oleh rumahtangga nelayan Bajo di Desa Mantigola terkait restriksi akses terhadap sumberdaya karang Karomaho yang merupakan zona inti taman nasional dan pengembangan wisata bahari di Kabupaten Wakatobi khususnya wisata edukasi di Pulau Hoga yang dikelola oleh lembaga internasional.

Berdasarkan uraian latarbelakang penelitian, maka permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan menggunakan lima modal penghidupan (Chambers and Conway, 1991; Ellis, 1998, 2000; Dharmawan, 2007) adalah: "Bagaimana gambaran tipologi kerentanan yang dialami oleh rumahtangga nelayan Bajo di Mantigola akibat dari pelarangan kegiatan penangkapan ikan pada wilayah Karang Kaledupa setelah terbentuknya TNKW dan otonomi daerah sebagai *starting point* pengembangan wisata Bahari di Kabupaten Wakatobi?."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif secara sekuensial menggunakan paradigma penelitian kualitatif (*post-positivistic*) dan selanjutnya menggunakan paradigma penelitian kuantitatif (*positivistic*). Paradigma kualitatif yang dimaksud menggali realitas social melalui teknik wawancara mendalam yang ditekankan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemaknaan dan perspektif nelayan Bajo Mantigola terhadap ekosistem dan lingkungan hidupnya yang kini telah berubah dan terus akan mengalami perubahan. Selain itu juga untuk menemukan pencirian bagi empat kategori rumahtangga: (1) **Cluster A** adalah rumahtangga nelayan yang sebelum ada TNKW dan otonomi daerah menjadi kabupaten hidup mapan/kaya saat ini juga kaya; (2) **Cluster B** adalah rumahtangga nelayan dulu kaya namun saat ini jatuh miskin (menurun kualitas hidupnya); (3) **Cluster C** adalah rumahtangga nelayan yang saat ini miskin sekarang lebih baik kehidupannya (meningkat kualitas hidupnya); (4) **Cluster D** adalah rumahtangga yang dahulu miskin sekarang tetap miskin. Setelah pengkategorian beserta penciriannya diketahui, kemudian populasi rumahtangga dipetakan sesuai dengan kategori yang dimaksud.

Penelitian dilakukan pada komunitas nelayan Bajo di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi ditentukan secara sengaja dengan mempertimbangkan fenomena sosial unik yang terjadi pada komunitas Bajo Mantigola yang mengalami kemandekan ekonomi. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, yang dimulai pada bulan Maret hingga bulan Mei 2017.

Data kemudian dianalisa dengan menggunakan tabel tabulasi silang. Data wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara kemudian disusun dalam bentuk catatan harian. Untuk memperkaya pembahasan, maka data kualitatif kemudian ditampilkan untuk mengaskan kuantifikasi atas realitas kerentanan yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Modal Alam Rumahtangga Nelayan Bajo Mantigola

Sebagai komunitas nelayan tradisional yang hidup di atas laut, sumberdaya perairan dan terutama karang merupakan sumber penghidupan utama bagi rumahtangga nelayan Bajo Mantigola. Sebelum penegasan zonasi taman nasional, nelayan Bajo bebas mengakses tiga wilayah karang di wilayah perairan Wakatobi. Tiga wilayah karang tersebut antara lain: (1) karang Kapota; (2) karang Kaledupa; (3) dan Karang *Maromaho*. Nelayan Mantigola mengakses dua wilayah karang antara lain Karang Kaledupa dan Karang *Maromaho* atau dikenal oleh masyarakat dengan karang *Kokka*. Karang Kapota cenderung dieksploitasi oleh nelayan Bajo Mola di Pulau Wangi-wangi. Menurut Damanik *et al.*, (2006) bahwa berdasarkan hasil identifikasi Balai TNKW tahun 2003, Kepulauan Wakatobi memiliki kekayaan sumberdaya hayati laut yang sangat bernilai: 530 spesies ikan, 314 jenis karang, 15 jenis alga, 9 jenis lamun, 32 jenis bakau, 6 jenis arthropoda, 85 jenis burung, 94 jenis echinodermata, 8 jenis mamalia, 5 jenis penyu, dan 210 jenis molusca.

Penegasan zonasi taman nasional Wakatobi pada tahun 2007 harus dilakukan oleh Balai Taman Nasional karena masih maraknya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan dengan menggunakan peledak dan sianida. Bahkan menurut Tadjuddah (2016) jika dibiarkan, potensi karang dan sumberdayanya akan rusak oleh kegiatan tangkap yang merusak. Smith (2003) *dalam* Damanik *et al.*, (2006) menegaskan bahwa berdasarkan studi ekologis yang dilakukan oleh *Operation Wallacea* (OPWAL), mayoritas terumbu karang dapat diklasifikasikan sebagai bagus atau sangat bagus (dengan tutupan karang 60-80%), bahkan ada yang memiliki tutupan karang >80%, dan hanya 1-2 transek memiliki kondisi rata-rata (atau tutupan karang 30-50%).

Zonasi taman nasional Wakatobi sendiri dibagi menjadi 6 zona. Menurut Tadjuddah (2016) berdasarkan Permenhut Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman zonasi (Moeliono *et al.*, 2010), 6 zonasi taman nasional Wakatobi antara lain: (1) zona inti (*core zone*); (2) zona perlindungan bahari (*no take zone*); (3) zona pariwisata (*tourism zone*); (4) zona pemanfaatan lokal (*local using zone*); (5) zona pemanfaatan umum. Roporsi wilayah pemanfaatan untuk masyarakat lokal atau zona pemanfaatan lokal adalah yang terbesar. Yakni sebesar 57,84% wilayah perairan dan pesisir diperuntukkan untuk pengelolaan masyarakat lokal. Orang Bajo Mantigola, sebagai subjek penelitian, hanya mengakses sumberdaya di sekitar pulau Kaledupa (pesisir Lentea, dan pesisir Sombano), dan karang Kaledupa. Jenis alat tangkap yang dominan bagi orang Bajo Mantigola untuk mengeksploitasi sumberdaya adalah pancing ikan dasar, panah, dan jaring. Sebagian kecil nelayan Bajo Mantigola yang bermodal menggunakan alat tangkap pancing tonda untuk menangkap ikan-ikan jenis pelagic besar. Tabel 1 berikut akan menunjukkan jenis alat tangkap, dan sumberdaya yang diperoleh dengan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan.

Tabel 1. Jenis Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan, Jenis hasil Tangkapan Nelayan Bajo Mantigola, Tahun 2017.

No	Jenis Alat Tangkap(Fishing Gear Type)/cara atau kegiatan penangkapan daqn mengekstrak sumberdaya	Lokasi/Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)	Hasil Tangkapan (Fishing Capture)
1.	Pancing Tonda	Laut Banda	Jenis Pelagic Besar: Cakalang, dan Tuna
2.	Pancing Ikan Dasar	Karang Kaledupa	Jenis ikan-ikan demersal : Kerapu, Katamba, gurita.
3.	Panah	Karang Kaledupa	Kerapu, Katamba, Gurita, teripang.
4.	Jaring (<i>palilibu</i>)	Perairan sekitar desa Mantigola, Perairan Lentea dan Sombano	Katamba, Baronang, Kola.
5.	<i>Meti-meti</i>	Perairan sekitar desa Mantigola, Perairan Lentea dan Sombano	Kerang Kempa, Bulu babi (<i>gumbagumba</i>), dan teripang
6.	Mengambil kayu bakar	Hutan mangrove di sekitar pesisir Umala dekat dengan pemukiman Bajo Mantigola	Kayu bakar, dan keping bakau
7.	Menambang karang	Perairan sekitar desa Mantigola, Perairan Lentea dan Sombano	Batu karang

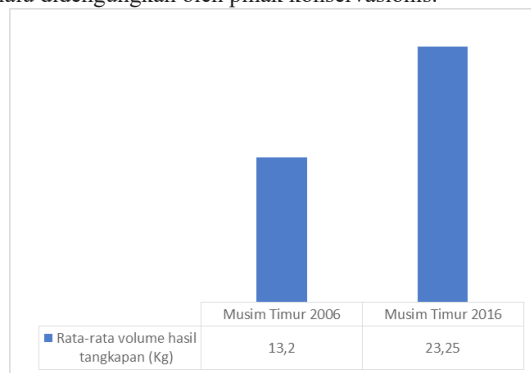
Sumber: Data Primer diolah, 2017

Setelah penegasan zonasi taman nasional, nelayan Bajo Mantigola khususnya nelayan pancing ikan dasar hanya bisa mengakses Karang Kaledupa. Dan wilayah sekitar pulau Kaledupa. Terkecuali nelayan pancing Tonda yang bisa menangkap pada hampir semua musim di Laut Banda.

Di sisi lain, nelayan Bajo pun mengakui bahwa perlindungan karang Maromaho melalui penegasan Taman Nasional berdampak baik dengan jumlah hasil tangkapan ikan karang di Karang Kaledupa (misalnya kerapu dan katamba). Namun, jenis biota yang ditangkap terbatas dan biota yang bernilai ekonomis tinggi (seperti penyu, kima, dan ikan napoleon) tidak lagi bisa ditangkap oleh nelayan.

Berdasarkan data (Gambar 1), terjadi peningkatan volume hasil tangkapan, yang pada musim Timur yang pada tahun 2006 rata-rata sebesar 13,2 Kg, saat ini pada musim Timur tahun 2016 meningkat menjadi 23,25 Kg. Menurut Darling (2014) bahwa pelarangan tangkap atas cadangan sumber daya perikanan adalah suatu instrumen yang populer untuk mengelola perikanan karang yang bertujuan untuk

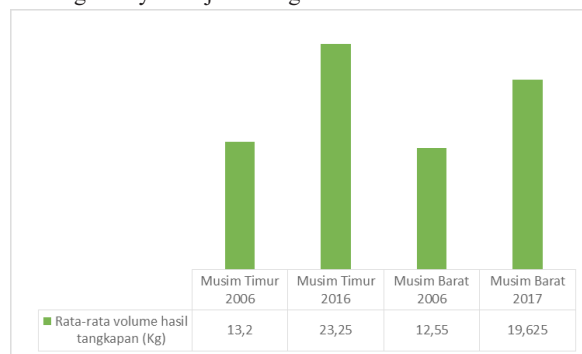
pemulihan biomassa ikan dalam wilayah taman nasional dapat memberikan kelimpahan dalam keuntungan ekonomi untuk nelayan melalui peningkatan jumlah hasil tangkapan dan pendapatan, dan hal ini selalu diasumsikan bahwa keuntungan langsung dari hasil tangkapan yang meningkat akan memberikan keuntungan tidak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat lokal khususnya terkait peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan. Sayangnya, pelarangan terhadap cadangan sumberdaya perikanan yang selalu didungungkan oleh pihak konservasionis.



Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Gambar 1. Rata-rata Volume Hasil Tangkapan Pancing Ikan Dasar Musim Timur Tahun 2006 dan Tahun 2016

Seperti layaknya nelayan lainnya, tidak sepanjang tahun bisa mendapatkan kelimpahan ikan. Nelayan Bajo Mantigola cenderung akan menangkap ikan dengan usaha maksimal pada saat musim Timur datang. Ancaman keganasan ombak di laut Banda, harus dihadapi karena menurut beberapa Responden, di saat-saat keganasan gelombang itu lah merupakan waktu ikan berlimpah. Nelayan percaya bahwa saat musim Timur datang (dimulai pada bulan Mei hingga Oktober), apalagi saat puncak musim Timur yakni pada bulan Juni dan Juli adalah musim ikan berpijah atau bertelur. Seorang responden menyampaikan bahwa pada musim timur merupakan saat ikan bermigrasi, sehingga musim Timur merupakan musim panen ikan bagi nelayan Bajo Mantigola.



Sumber: Data Primer diolah, 2017

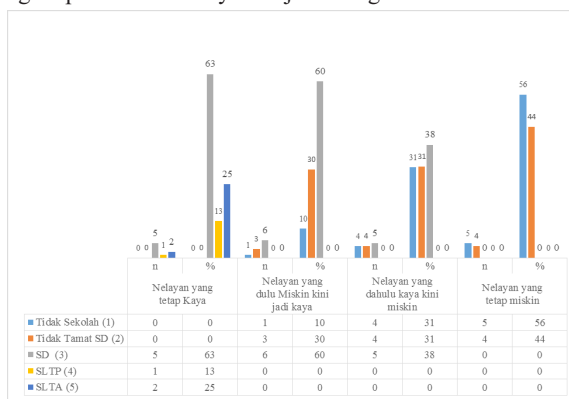
Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Volume Hasil Tangkapan Pancing Ikan Dasar Berdasarkan Musim Timur dan Musim Barat Tahun 2006 dan Tahun 2016

Pada musim Timur tahun 2006 volume hasil tangkapan ikan-ikan dasar sebesar 13,2 Kg, sementara pada musim Barat tahun 2006 rata-rata sebesar 12,55 Kg (Gambar 2). Demikian halnya pada musim Timur tahun 2016, volume hasil tangkapan nelayan pancing ikan dasar sebesar 23,35 Kg per 1

turo puncak musim, sementara pada musim Barat tahun 2017 sebesar 19,625 per 1 turo pada puncak musim. Pada musim Barat, sebagian besar nelayan Bajo tidak mengerahkan tenaga untuk mencari ikan di karang seperti saat musim Timur. Mereka biasanya akan lebih sering mencari ikan di sekitar pemukiman, perairan Lentea, dan Sombano atau yang biasa mereka istilahkan dengan *palilibu*.

Kerentanan Modal Manusia Rumahtangga Nelayan Bajo Mantigola

Kerentanan bisa juga muncul tidak hanya karena keterbatasan akses nelayan terhadap modal alam bahkan ketersediaan stok sumberdaya, melainkan juga karena keterbatasan pada modal manusia. Modal manusia dianggap sebagai potensi yang melekat dalam diri individu nelayan. Modal manusia yang diteliti antara lain tingkat pendidikan formal, dan keterampilan. Pendidikan formal merupakan salah satu saluran utama bagi siapa pun yang ingin keluar dari kemiskinan. Karena kemiskinan selalu disandingkan dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pendidikan. Pada kondisi masyarakat saat ini yang lebih mementingkan dasar pelapisan sosial berdasarkan prestasi (*achieve status*) dibandingkan dengan garis keturunan (*ascribe status*), pendidikan menjadi jalan mobilitas sosial naik bagi masyarakat dari lapisan bawah. Data pada Gambar 3 berikut ini akan menjabarkan kondisi tingkat pendidikan nelayan Bajo Mantigola.



Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Gambar 3. Perbandingan Tingkat Pendidikan Formal Responden Nelayan Bajo Mantigola Berdasarkan Tipe Rumahtangga Nelayan Tahun 2017

Nelayan Bajo selain identik dengan kegiatan tangkap yang merusak lingkungan, juga identik dengan nelayan yang sulit menempuh pendidikan formal. Data pada Gambar 3 di atas membuktikan bahwa stigmatisasi tersebut melekat kuat kepada masyarakat Bajo khususnya di Mantigola. Sebagian besar nelayan khususnya yang jatuh miskin (C) dan nelayan yang tetap terjebak dalam kemiskinan (sebelum penegasan zonasi taman nasional) berpendidikan sangat rendah, sebagian besar nelayan yang menjadi responden pada kategori C dan D, tidak pernah menempuh pendidikan formal, dan menempuh pendidikan sekolah dasar namun tidak tamat SD. Pendidikan tertinggi berasal dari responden pada kategori A atau tetap kaya, yakni sebanyak dua orang mampu menyelesaikan pendidikan formal hingga ke bangku sekolah menengah atas. Menurut Clifton dan Major (2012) nelayan Bajo yang kaya diasumsikan

memiliki pendidikan yang lebih baik, dan pada akhirnya akan lebih adaptif terhadap kebijakan taman nasional. Sebaliknya nelayan yang hidup dengan orientasi subsisten, yang kurang mengenyam pendidikan formal bahkan tidak lancar berbahasa Indonesia akan resisten terhadap kebijakan taman nasional.

Selain pendidikan, keterampilan merupakan modal penting bagi siapa pun yang ingin bertahan dari kemiskinan atau bahkan keluar dari kemiskinan. Sebagian besar nelayan Bajo -bahkan menjadi ciri khas dari nelayan Bajo yang melakukan kegiatan tangkap secara tradisional- adalah kemampuan mereka di dalam melakukan penyelaman dalam waktu yang relatif lama untuk mencari ikan tanpa menggunakan peralatan penyelaman dengan menggunakan alat tangkap panah (*spear gun*). Kemampuan ini lah yang kemudian memudahkan para nelayan Bajo Mantigola untuk memperoleh ikan-ikan karang, dan gurita yang saat ini menjadi primadona bagi penampung-penampung ikan di Mola yang terhubung dengan pasar global.

Kerentanan Modal Sosial Rumahtangga Nelayan Bajo Mantigola

Berbeda dengan Bajo di Mola Pulau Wanci, Bajo Mantigola begitu tegas memisahkan dirinya dengan orang-orang darat (*Bagai*) khususnya Bagai Kaledupa. Sumber dari ketidakharmonisan hubungan antara orang Bajo dan orang darat Kaledupa adalah karena keberpihakan orang-orang Bajo dengan pemberontak Kahar Muzakar. Serangan gerombolan masih diingat dengan lekat oleh sebagian besar orang-orang Kaledupa yang telah beranjak senja, saat itu serangan gerombolan menelan banyak korban dari orang Kaledupa yang hilang diculik dan kehilangan nyawa, banyak perempuan Kaledupa saat itu yang menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Serangan balik orang Kaledupa kepada gerombolan dan memaksa kampung Mantigola saat itu dikosongkan, kemudian orang Bajo Mantigola pindah ke Mola untuk mencari perlindungan. Hingga saat ini, kebencian terhadap orang Bajo Mantigola bermuara pada munculnya perilaku tidak menyenangkan oleh orang Kaledupa kepada orang Bajo Mantigola (Wianti, 2012).

Bukanlah suatu keraguan terkait hubungan mengikat kedalam orang-orang Bajo Mantigola yang begitu kuat. Bahkan jika terdapat masalah antara orang darat dan orang Bajo, kekuatan sosial mengikat ke dalam nampak sebagai perisai bagi Orang-orang Bajo. Hal ini telah dijabarkan sebelumnya mengenai kesejarahan Orang Bajo dalam keterlibatannya dalam gerombolan Kahar Muzakar, dan kemudian meminta perlindungan kepada saudaranya di Mola. Tentu, kekuatan mengikat ke dalam menjadi gambaran sisi gelap dari kekuatan sebagai orang Bajo. Menurut Portes dan Landolt (2000 *dalam* Turner, 2007) misalnya terdapat empat bentuk sisi gelap kekuatan modal sosial salah satunya adalah penolakan yang tegas terhadap pihak luar, dalam kasus Bajo Mantigola penolakan dan bentuk perlawanan diam-diam terhadap pihak-pihak yang membatasi ruang nafkah di karang antara lain pihak taman nasional.

Inklusifitas Bajo yang kuat juga dipelihara dengan upaya resiprositas yang tinggi. Misalnya menurut Clifton dan

Majors (2012) mengapa kegiatan tangkap yang dilakukan oleh orang Bajo menggunakan bius (*Blast fishing*) tetap eksis, karena aktivitas ini selalu memiliki peran penting mendukung ekonomi semua orang Bajo di setiap desa melalui sistem berbagi hasil tangkapan. Berbagi hasil tangkapan (catch sharing) secara esensial merespon ketidakpastian hasil tangkapan dan tentunya melibatkan pertukaran (meskipun tidak seimbang) antara lingkaran keluarga (extended family) dan pertetangan (*neighboring*) di kampung Bajo. Pada akhirnya pertukaran ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang menjadi elemen vital dari menguatnya bonding sosial capital untuk mendukung keluarga Bajo yang subsisten dan miskin, sebaliknya juga mendukung nelayan Bajo yang kaya. Menurut Chou (1994) ekspektasi dan kewajiban diantara sesama Bajo semakin meningkat ketika terkait sanak saudara yang sakit dan kematian. Apapun surplus yang diperoleh setiap rumahtangga harus disumbangkan kepada keluarga yang membutuhkan. Saling berbagi dan memberikan pertolongan menjadi ikatan yang kuat antara sesama Bajo.

Tegasnya perbedaan antara orang Bajo dan orang darat Kaledupa kemudian juga berdampak pada perilaku orang Bajo kepada semua orang darat yang datang ke Mantigola, termasuk penerimaan orang Bajo kepada pemerintah. Beberapa orang darat Kaledupa yang kami temui mengungkapkan bahwa orang Bajo atau *ammai wa'du* mudah berkata bohong dan sulit untuk dipercaya. Sementara informan kami yang adalah orang Bajo mengatakan bahwa orang Kaledupa sering berlaku kasar kepada mereka. Pada akhirnya sikap antagonisme orang-orang Kaledupa menciptakan hambatan pada perputaran ekonomi di Mantigola. Tidak adanya pasar sebagai tempat Orang Bajo Mantigola menjual hasil tangkapan, kami duga sebagai salah satu sumber kemandekan ekonomi di Mantigola yang pada akhirnya mendorong pada kerentanan rumahtangga nelayan Bajo Mantigola jatuh pada kondisi kemiskinan. Melihat kecenderungan ini, kami mencoba menanyakan beberapa pertanyaan terkait persepsi orang Bajo terhadap orang Bagai Kaledupa, dan kami juga menanyakan pertanyaan yang sama terkait persepsi orang *Bagai* Kaledupa terhadap orang Bajo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar interaksi sosial antara orang Bajo (*Sama*) Mantigola dengan orang darat (*Bagai*) Kaledupa terjadi dalam 1 hingga dua kali interaksi sosial dalam seminggu. Sebanyak 16 orang responden atau sekitar 40 responden melakukan interaksi dengan orang darat sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Berdasarkan kluster data, responden pada cluster A cenderung melakukan interaksi sosial sebanyak satu hingga dua kali dalam seminggu dengan orang darat untuk tujuan ekonomi, yakni jual beli hasil tangkapan. Menurut salah satu responden, urusan bisnis hasil tangkapan lebih banyak kepada orang Bajo di Mola. Orang darat Kaledupa hanya datang ke Mantigola untuk mencari ikan untuk dikonsumsi sehari-hari.

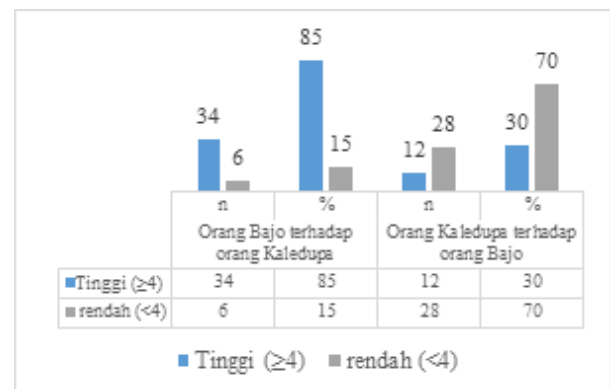
Selain interaksi, kami juga meneliti sejauh mana rasa kepercayaan orang Bajo terhadap orang darat, dan kami juga mencari fakta sejauhmana orang darat menaruh rasa percaya terhadap orang Bajo (*Sama*) Mantigola. Menurut Paldam (2009) bahwa salah satu variabel penting dalam diskusi kritis modal sosial adalah kepercayaan (trust). Banyak

pakar mengemukakan bahwa kepercayaan mengurangi biaya transaksi dan pengawasan.

Kepercayaan dimaknai sebagai kepercayaan diri terhadap sesuatu (seseorang atau sistem) yang dipercaya (meminjam pengertian Giddens terhadap konsep kepercayaan):

“trust is a concept of confidence in the reliability of a person or a system” (Giddens, 1991).

Di dalam penelitian ini, kepercayaan diukur sebagai suatu derajat dari dasar kepercayaan terhadap orang lain dalam hal ini kepercayaan orang Darat (*Bagai*) kepada orang Bajo Mantigola, dan sebaliknya bagaimana kepercayaan orang Bajo Mantigola terhadap Orang darat (*Bagai*) Kaledupa. Hasil penelitian (Gambar 4) menunjukkan bahwa kepercayaan orang Bajo terhadap orang darat Kaledupa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kepercayaan orang darat Kaledupa terhadap orang Bajo Mantigola. Sebanyak 34 responden Bajo Mantigola percaya dengan orang darat Kaledupa. Namun sebanyak 6 orang Bajo Mantigola menyatakan rasa tidak percayanya terhadap orang darat Kaledupa. Nilai tertinggi dari kepercayaan orang Bajo terhadap orang darat Kaledupa adalah 9; dan terendah adalah 3. Nilai tertinggi berasal dari rumahtangga kategori D atau rumahtangga yang tetap miskin sebelum dan sesudah penegasan zonasi taman nasional. Kenyataan lain yang kami dapatkan responden rumahtangga Bajo yang memberi nilai tertinggi terkait kepercayaannya terhadap orang darat, dipengaruhi oleh Beberapa responden mengungkapkan bahwa orang darat sering tidak menepati janjinya, dan menggunakan orang Bajo untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, orang Bajo selalu diperlakukan kasar dan tidak adil oleh orang darat.



Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Gambar 4. Perbandingan tingkat kepercayaan Orang Bajo Mantigola dan Orang Darat kaledupa

Sebaliknya, kepercayaan orang darat terhadap orang Bajo Mantigola cenderung lebih rendah. Dari 40 responden orang darat yang kami pilih secara acak, dan dengan syarat bahwa sering melakukan interaksi dengan orang Bajo, sebanyak 28 responden atau sekitar 70 persen responden memberikan nilai kepercayaan yang rendah kepada orang Bajo (Gambar 4). Menurut sebagian besar responden orang darat, orang Bajo tidak dipercaya terkait dengan hubungan jual beli. Orang Bajo juga sulit mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh orang

darat dalam bentuk uang tunai maupun makanan (*kasoami*). Sebagian kecil responden orang darat, sebanyak 12 responden atau sekitar 30 persen responden menyampaikan bahwa orang Bajo dapat dipercaya, karena watak orang Bajo yang takut dengan orang darat Kaledupa, sehingga menurut responden Ia akan takut berbohong dengan orang darat.

Dari uraian tersebut, modal sosial rumahtangga nelayan Bajo relatif lebih rentan ketika terkait dengan interaksi dengan orang darat, khususnya orang darat Kaledupa. Kuatnya stigmatisasi orang darat Kaledupa terhadap orang Bajo yang selalu dihubungkan dengan sejarah kelam keberpihakan orang Bajo terhadap pemberontakan Kahar Muzakar menguatkan kerentanan orang Bajo Mantigola. Pada akhirnya lemahnya modal sosial tersebut melumpuhkan pergerakan ekonomi desa Mantigola. Di sisi yang lain hubungan yang inklusif di dalam kampung Bajo Mantigola melalui hubungan kekerabatan (*daparanakan*) dan hubungan patron client menjadi penyangga utama dalam menghadapi krisis.

Kerentanan Modal Fisik Nelayan Bajo Mantigola

Modal fisik dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi infrastruktur yang semestinya menjadi katalisator perkembangan ekonomi di kampung Bajo Mantigola. Modal fisik yang akan kami bahas adalah infrastruktur penghubung antara wilayah darat dengan kampung terapung di Mantigola, kondisi listrik dan sarana air bersih, pasar serta sarana kesehatan.

Tidak ada yang berbeda dari kampung Bajo Mantigola dengan kampung Bajo lainnya di Pulau Kaledupa (misalnya dengan kampung Bajo Sampela). Kampung Bajo Mantigola merupakan kampung terapung (*water village*) yang dekat dengan kawasan Mangrove pulau Kaledupa. Hal ini jelas akan sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kampung Mola di pulau Wanci yang menyatu dengan daratan. Menuju kampung Mantigola akan sedikit sulit karena belum rampungnya jembatan yang menghubungkan darat Kaledupa dengan kampung Bajo Mantigola. Kunjungan pertama kali di Mantigola pada tahun 2011, kondisi jembatan tidak ada yang

berubah, tetap sama tidak bisa digunakan.

Hal inilah yang menyulitkan orang darat untuk ke kampung Bajo Mantigola. Namun, kondisi jembatan yang tidak layak digunakan memberikan peluang nafkah kepada orang-orang Mantigola untuk mengoperasikan kuli-kuli atau *lepa-lepa* sebagai ojek perahu. Namun, itu bisa menjadi mata pencaharian jika air laut telah pasang. Jika air laut sedang surut (*meti*) maka ojek perahu tidak akan bisa mencari penumpang.

Selain jembatan, kampung Bajo Mantigola menghadapi kendala pasokan listrik yang hanya bisa dirasakan dari jam 6 sore hingga pukul 5 subuh. Ketiadaan pasokan listrik memberikan kendala besar khususnya bagi nelayan-nelayan pancing tonda untuk menyimpan hasil tangkapan ikan. Keterbatasan akses listrik juga menghalangi para ibu mencari nafkah tambahan atau sekedar membantu suami.

Ketiadaan pasar menjadi sumber kerentanan lainnya yang harus dihadapi oleh orang Bajo Mantigola. Pembeli yakni orang darat harus datang ke Mantigola jika tidak mendapatkan ikan di pasar Sampoawatu tempat orang Bajo Sampela memperjualbelikan hasil tangkapannya. Orang Bajo Mantigola tidak bisa menjual hasil tangkapan (misalnya dengan cara palilibu dan *meti-meti*) dengan harga yang menguntungkan. Mereka hanya mengandalkan satu dua orang papalele dan orang darat yang datang untuk membeli ikan. Jika tidak ada yang membeli, mereka jual dengan tetangga, jika tidak laku maka ikan mereka konsumsi sendiri (subsistensi) dan cara mengawetkan hasil tangkapan untuk dinikmati pada hari selanjutnya atau untuk dijual untuk membeli *kasoami* adalah dengan mengolah ikan hasil tangkapan menjadi ikan asin.

Dari pembahasan mengenai modal fisik (physical capital), temuan menarik yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sebelum dan sesudah zonasi taman nasional, infrastruktur yang memfasilitasi Bergeraknya roda ekonomi di Mantigola tidak mengalami perubahan yang berarti. Kurangnya modal fisik di dalam desa dan yang menghubungkan desa dengan “ekonomi darat” memberikan tekanan tersendiri terhadap kerentanan rumahtangga nelayan Bajo Mantigola jatuh dalam

Tabel 2. Perubahan Jumlah Pendapatan Hasil Tangkapan Pancing Ikan Dasar Berdasarkan Cluster Data Responden Penelitian dan Musim Angin Timur dan Barat, Tahun 2007 dan Tahun 2017

Perubahan Jumlah Hasil tangkapan Pancing Ikan dasar (Rp)	Cluster A				Cluster B				Cluster C				Cluster D			
	Musim Timur 2007		Musim Timur 2017		Musim Barat 2007		Musim Barat 2017		Musim Timur 2007		Musim Timur 2017		Musim Barat 2007		Musim Barat 2017	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
>7.324.733	1	20	1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.324.733-2.695.502	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	1	50	-	-	-	-
<2.695.502	4	80	2	67	2	100	3	75	2	100	1	50	4	100	4	100
Total	5	63	3	100	2	100	4	100	2	100	2	100	4	100	4	100
Rata-rata	2.940.000		8.333.333		500.000		1.550.000		800.000		3.150.000		620.000		850.000	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Tabel 3. Perubahan Jumlah Pendapatan Hasil Tangkapan Pancing Ikan Dasar Berdasarkan Cluster Data Responden Penelitian, dan Musim Angin Timur dan Barat, Tahun 2007 dan Tahun 2017

Perubahan Jumlah Hasil tangkapan Pancing Ikan dasar (Rp)	Cluster A				Cluster B				Cluster C				Cluster D			
	Musim Barat 2007		Musim Barat 2017		Musim Barat 2007		Musim Barat 2017		Musim Barat 2007		Musim Barat 2017		Musim Barat 2007		Musim Barat 2017	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
>7.324.733	1	33	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.324.733-2.695.502	0	0	1	33	1	25	0	0	0	0	1	50	0	0	0	0
<2.695.502	2	67	1	33	3	75	4	100	2	100	1	50	4	100	4	100
Total	3	100	3	100	4	100	4	100	2	100	2	100	4	100	4	100
Rata-rata	8.333.333		8.783.333		1.550.000		1.065.000		3.150.000		1.500.000		850.000		512.500	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

batas subsistensi mereka.

Kerentanan Modal Finansial Rumahtangga Nelayan Bajo Mantigola

Seperti yang telah kami jabarkan pada pembahasan terkait modal alam (*natural capital*) terkait bagaimana penegasan zonasi taman nasional Wakatobi, merubah akses nelayan Bajo khususnya wilayah karang Maromaho yang saat ini merupakan zona inti taman nasional. Selain tidak bisa lagi mengakses wilayah karang Maromaho, beberapa biota juga tidak boleh ditangkap dan diperjualbelikan seperti penyu hijau, kima, hiu, dan ikan napoleon. Serta pelarangan melakukan kegiatan tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan sianida, dan bahan peledak. Semua aktivitas ini lekat dengan mata pencaharian orang Bajo di Wakatobi (Clifton dan Majors, 2012). Hal ini tentu memukul sendi-sendi perekonomian orang Bajo Mantigola setelah sebelumnya muncul pelarangan untuk menangkap di wilayah perbatasan Indonesia Australia (Wianti, 2012). Pada akhirnya semua ini berakibat kemudian kepada rentannya rumahtangga nelayan jatuh pada kondisi di batas subsistensi.

Transformasi modal finansial rumahtangga nelayan Bajo akan kami uraikan dari dimensi pendapatan perikanan (*fishing income*); pendapatan non perikanan (*non fishing income*); hutang rumahtangga (*debtness*) yang dianalisa dengan membandingkan 4 cluster responden. Pendapatan perikanan akan kami fokuskan pada pembahasan terkait musim tangkap, dan pada perikanan demersal yang identik dengan nelayan Bajo Mantigola, dan kegiatan Meti-meti yang biasa dilakukan oleh para Ibu di Bajo Mantigola.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 2), setelah zonasi Taman Nasional, pendapatan tertinggi rumahtangga nelayan Bajo dari hasil perikanan tangkap diperoleh saat musim Timur. Hampir semua responden dari 4 cluster mengalami lonjakan pendapatan. Misalnya saja untuk responden cluster A yang fokus pada kegiatan penangkapan ikan demersal sekaligus sebagai punggawa kelompok Pongka di Karang Kaledupa, sebelum penegasan zonasi taman nasional pendapatan perikanan dalam 1 Turo rata-rata hanya berkisar Rp. 2.942.000. Setelah penegasan zonasi taman nasional melonjak drastis dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 8.333.333. Demikian juga halnya dengan nelayan 4 rumahtangga cluster D, yang tetap berstatus nelayan miskin, mengalami peningkatan pendapatan pada musim Timur setelah penegasan zonasi taman nasional. Rata-rata pendapatan nelayan dalam 1 turo saat tahun 2006 sebesar Rp. 620.000, sementara pada musim Timur tahun 2017 sebesar Rp. 850.000.

Sebaliknya, dahulu nelayan bisa memperoleh kelimpahan sumberdaya pada musim timur sebelum zonasi taman nasional. Namun, saat ini musim Barat bagi nelayan Bajo Mantigola dianggap sebagai musim paceklik. Hasil survey menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sebelum penegasan zonasi taman nasional rata-rata pendapatan nelayan pada cluster B pada musim Barat untuk 1 Turo sebesar Rp. 1.550.000, sementara pada musim Barat tahun 2017 sebesar Rp.1.065.000. Penurunan drastis terjadi pada rumahtangga nelayan cluster

C, musim barat tahun 2006, nelayan bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp. 3.150.000, sementara pada tahun 2017, nelayan hanya bisa memperoleh pendapatan rata-rata untuk 1 turo sebesar Rp. 1.500.000. Nelayan dari cluster D yang miskin juga mengalami hal yang serupa, pada tahun 2007 mereka bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 850.000 per 1 turo untuk menangkap ikan dasar dengan sistem pongka atau berkelompok. Sementara pada tahun 2017, 10 tahun setelah penegasan zonasi taman nasional nelayan hanya mendapatkan Rp. 512.500 per 1 turo.

Musim barat bagi nelayan Bajo Mantigola yang berada dekat dengan batas subsistensi bukan lagi sebagai musim banyak ikan layaknya sebelum penegasan zonasi taman nasional. Pada Tabel 3 Misalnya saja rumahtangga nelayan cluster C dahulu bisa mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp. 3.150.000 per 1 turo, namun saat ini hanya bisa mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp. 1.500.000 per 1 turo.

Menurut pengakuan seorang responden pada cluster D, bahwa jika mengikut kelompok pongka, keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Jika punya modal sedikit dan bisa melaut sendiri ke karang, hasil yang bisa diperoleh lebih besar. Namun, mereka terkendala dengan biaya operasional yang besar. Mau tidak mau, nelayan yang miskin hanya bisa menjual tenaganya kepada punggawa laut adalah dengan ikut kelompok penangkapan (*Bapongka*).

Kenyataan ini sesungguhnya menunjukkan daya adaptasi rumahtangga nelayan Bajo dan secara umum menggambarkan upaya mengatasi krisis dalam skala kelompok pongka. Dahulu, musim Timur dianggap sebagai musim sulit ikan, angin yang kencang, dan gelombang tinggi laut Banda menyulitkan nelayan untuk mencari di karang. Namun, setelah penegasan zonasi taman nasional dan hanya mengandalkan karang Kaledupa sebagai wilayah tangkap ikan dasar, maka musim Timur yang ganas diterjang oleh kelompok nelayan Pongka untuk mencari ikan karang yang bernilai ekonomi tinggi misalnya ikan kerapu (*Grouper*). Ditambah dengan keyakinan mereka bahwa arus yang kuat merupakan ciri banyak ikan, dan pada musim tersebut ikan diyakini bermigrasi maka semakin mendorong nelayan untuk berangkat ke karang mencari ikan meskipun harus menghadapi bahaya dan mengancam keselamatan. Jika mereka menyerah dengan keadaan, tentu akan mengancam keamanan subsistensi rumahtangga khususnya rumahtangga nelayan cluster C dan D.

Selain kegiatan menangkap ikan di karang dan disekitar pemukiman yang dominan dilakukan oleh para lelaki Bajo, rumahtangga nelayan Bajo juga mengandalkan meti-meti, atau mengambil kerang-kerangan saat air laut surut (*meti*) bukan hanya untuk dikonsumsi (subsistensi) melainkan juga untuk dijual kepada orang darat.

Hasil meti-meti dijual kepada pembeli di dalam kampung Mantigola dan orang darat yang datang ke desa. Rata-rata pendapatan yang bisa diperoleh dari *meti-meti* saat *meti* tinggi atau surut terjauh yakni pada bulan September hingga bulan Oktober untuk puncak meti musim angin Timur, dan pada bulan November hingga Januari untuk meti musim Barat

dalam sehari bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 130.000. *Meti-meti* hanya bisa dilakukan selama 5 jam saja saat air surut di siang hari. Pada bulan februari hingga bulan agustus adalah pasang tinggi air laut, sehingga sulit untuk mendapatkan meti-meti., sementara saat pasang tinggi, para istri rata-rata hanya bisa mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 30.000 per hari (Kamal, 2017).

Pendapatan di luar kegiatan perikanan hanya dilakukan oleh beberapa responden saja. Antara lain sebagai tukang pembuat perahu, penambang batu karang, berjualan kue, dan menjual sembilan bahan pokok dan keperluan memancing seperti bahan bakar, tali pancing, mata kail, dsb. Untuk kegiatan menambang batu karang sebagai bahan pondasi rumah nelayan Bajo di Mantigola dan sebagai bahan dasar pembuatan keramba di bawah rumah tidak menentu penghasilannya.

Dua orang istri nelayan dari cluster B dan Cluster C membantu suami dengan berjualan kue mengelilingi kampung, dan menitipkan kue buaatannya pada warung-warung kecil yang menjual sembilan bahan pokok. Dari berjualan kue, rata-rata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 20.000-40.000 per harinya. Budaya jajan yang tinggi baik anak-anak Bajo maupun dewasa hingga lanjut usia, membuat usaha kue merupakan alternatif mata pencaharian yang menguntungkan, dan membantu perekonomian rumahtangga.

Selanjutnya, hutang adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang Bajo di Mantigola. Hutang juga merupakan kewajiban yang melibatkan ikatan moral. Hutang akan semakin membengkak dikala musim Barat tiba. Karena pendapatan dari hasil menangkap ikan sedikit dibandingkan dengan pengeluaran rumahtangga. Rata-rata hutang rumahtangga sekitar Rp. 1.460.862 per bulannya. Hutang paling besar dari responden cluster B sebesar Rp. 10.000.000 ke punggawa. Beberapa responden mengungkapkan membayar hutang juga lebih ringan karena rasa percaya si pemberi hutang kepada responden, dan utang biasanya akan dilunasi dengan cara mencicil setelah melaut dan mendapatkan uang bagi hasil, punggawa akan memotong uang hasil pinjaman dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hutang yang “kecil-kecil namun lama-lama menjadi bukit” adalah hutang sembako dan jajan anak di kios. Untuk keperluan sembako, rumahtangga biasanya berhutang sekitar Rp. 100.000-500.000.

Dari pemaparan pada bagian modal finansial atau modal ekonomi. Nelayan Bajo khususnya cluster C dan D lah yang paling rentan dalam kaitannya dengan pendapatan kegiatan tangkap. Mereka hanya mengandalkan tenaga, loyalitas sebagai nelayan sawi, dan keterampilan menyelam untuk bergabung dalam kelompok penangkapan pongka di karang Kaledupa. Musim angin sangat berperan menciptakan Bagi nelayan cluster C dan D, palilibu menjadi upaya untuk mencegah keluarganya jatuh di bawah batas subsistensi. *Meti-meti* merupakan upaya pengerahan tenaga kerja khususnya para Ibu atau isteri nelayan yang menurut Scott (1976) merupakan upaya pengerahan tenaga kerja untuk menjamin penghasilan minimum. Tenaga kerja bagi rumahtangga ini menurut Scott kemudian merupakan faktor produksi yang dimiliki petani (atau dalam tulisan ini nelayan) secara relatif melimpah,

sehingga karena kondisi rumahtangga nelayan yang miskin yang mengancam batas subsistensi mereka, pada akhirnya mereka akan terpaksa melakukan beragam kegiatan yang memerlukan banyak tenaga kerja dengan hasil yang sangat kecil sampai semua kebutuhan subsistensinya terpenuhi. Termasuk harus berhutang bukan untuk mengakumulasi kapital seperti responden pada cluster A, atau konsolidasi yang condong dilakukan oleh responden pada cluster B, termasuk dengan menjalankan usaha kios dan menjual kue keliling kampung untuk istri dari rumahtangga cluster A dan B, melainkan untuk bertahan dari *shock* akibat restriksi taman nasional untuk mengakses karang Maromaho yang berlimpah sumberdayanya, dan kondisi sumberdaya alam yang tidak selalu memberikan kepastian dalam memperoleh hasil tangkapan. Belum lagi posisi marjinal orang Bajo Mantigola di mata *Bagai* Kaledupa memberikan tekanan tersendiri bagi kelangsungan nafkah hidup keluarganya. Melepaskan status dan otonomi (Scott, 1976) harus dilakukan oleh nelayan Bajo cluster C dan D dengan ikut dalam kelompok *pongka* meskipun tidak akan banyak memberikan pendapatan dibandingkan tenaga dan keselamatan saat melaut di musim angin Timur atau menjadi otonom. karena ikut *pongka* berarti akan menjamin subsistensi minimum dan leluasan berhutang dengan *punggawa* disaat-saat yang mendesak.

Keterkaitan Lima Modal Penghidupan dengan Kerentanan Rumahtangga Nelayan Bajo Mantigola

Seperti yang telah kami jabarkan pada bagian awal tulisan ini bahwa kelemahan lima modal penghidupan yakni : (1) modal alam (*natural capital*); (2) modal fisik (*physical capital*); (3) modal social (*social capital*); (4) modal ekonomi (*financial capital*); (5) dan modal manusia (*human capital*) Strategi mata pencaharian yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir merupakan kombinasi dari kelima modal tersebut untuk dimobilisasi, dan meningkatkan kapabilitas untuk mencapai kesejahteraan (Badjeck, *et al.*, 2010). Kelemahan kelima modal dari orang Bajo Mantigola diasumsikan menimbulkan kerentanan jatuh di bawah batas subsistensi.

Kerentanan yang muncul dari modal alam yakni karena ketergantungan orang Bajo terhadap ketersediaan sumberdaya perikanan berdasarkan musim angin dan wilayah penangkapan. Pada bagian pembahasan telah dijabarkan bahwa pada musim angin Barat, nelayan cenderung lebih sulit mendapatkan kelimpahan ikan. Sementara musim Timur yang berbahaya menjadi musim kelimpahan ikan untuk nelayan Bajo. Selain musim angin, wilayah penangkapan yang semakin terbatas juga menimbulkan kerentanan tersendiri, meskipun pada bagian pembahasan modal alam telah disinggung bahwa terjadi peningkatan volume hasil tangkapan. Para nelayan Bajo mengungkapkan bahwa hal ini terjadi sebagai dampak dari pelarangan wilayah karang Maromaho sebagai zona inti yang dahulu menjadi wilayah tangkap nelayan Bajo Mantigola untuk mencari penyu, sunu, napoleon, lobster, hiu, dan kima yang memberikan masa keemasan bagi nelayan Bajo di Wakatobi dan khususnya Bajo Mantigola dan Mola.

Kerentanan dari modal fisik yakni tidak berfungsinya infrastruktur yang menjadi katalisator bergeraknya ekonomi di

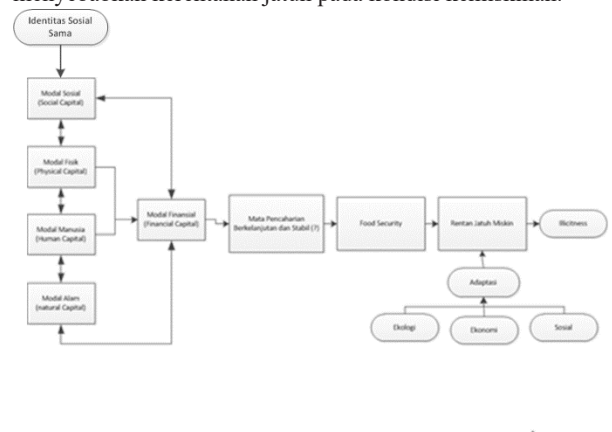
Mantigola antara orang Bajo (*Sama*) dan orang Darat (*Bagai*). Tidak berfungsinya jembatan yang menghubungkan daratan dengan Kampung Bajo, keterbatasan pasokan listrik, dan tidak adanya pasar untuk hasil-hasil tangkap nelayan Mantigola menyebabkan rumahtangga nelayan Bajo Mantigola sangat rentan jatuh dalam kondisi kemiskinan.

Dari sisi modal manusia (*human capital*), rendahnya pendidikan formal menjadi perangkap kemiskinan selanjutnya. Pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bahwa sebagian besar responden rata-rata hanya mampu menamatkan pendidikannya pada tingkat sekolah dasar saja. Hal ini membatasi nelayan untuk memperluas peluang mata pencaharian di luar kegiatan tangkap. Pada akhirnya mereka cenderung mengeksploitasi sumberdaya dan tenaganya serta tenaga kerja keluarganya untuk menghasilkan pendapatan atau minimal untuk subsistensi rumahtangga. Kami menemukan kenyataan bahwa nelayan usia produktif seringkali mengerahkan daya dan tenaga sekuat tenaga untuk mencari nafkah meskipun harus mengancam nyawa seperti melakukan penyelaman dengan bantuan kompresor, dan menangkap di musim Timur yang sangat berbahaya bagi keselamatannya. Namun, keterampilan menangkap dengan cara menggunakan panah, menyelam pada kedalaman tertentu untuk waktu di atas kemampuan manusia yang normal, dan menciptakan alat tangkap atas pengamatan dan pengalaman mengamati tingkah laku ikan, serta membaca kondisi alam atau tanda-tanda alam menjadi media penting bagi orang Bajo Mantigola untuk semakin memperkuat basis mata pencaharian pada kegiatan penangkapan. Mengerahkan anggota rumahtangga lainnya, Para ibu dan anak-anak terampil melakukan *meti-meti*, yang hasilnya untuk memenuhi pangan rumahtangga. Menurut Weeratunge, Snyder, dan Chou, (2010) ciri khas nelayan kecil adalah besarnya peran laki-laki maupun perempuan dalam mencari nafkah dan seringkali peran tersebut saling komplementer.

Modal sosial menjadi sumber penting kerentanan selanjutnya (lihat McClanahan, *et al.*, 2008 dan faraco., *et al.*, 2010). Modal sosial melintas batas (*linking social capital*) yang lemah dibuktikan dengan rendahnya intensitas interaksi orang Bajo Mantigola dengan orang darat (*Bagai*) Kaledupa, menyebabkan sulitnya orang Bajo Mantigola menggerakkan roda perekonomian dengan menjual hasil tangkapan. Sikap tanpa kompromi dan perlabelan negative orang darat Kaledupa terhadap orang Bajo Mantigola memberikan peluang kerentanan untuk jatuh pada kondisi kemiskinan. Ditambah lagi dengan kuatnya keyakinan perbedaan orang Bajo dan orang darat Kaledupa melalui nilai-nilai *Sama-Bagai* menguatkan kerentanan orang Bajo Mantigola, hal ini lah yang menyebabkan sulitnya orang Bajo memiliki mata pencaharian di darat. Hal yang berbeda misalnya pada komunitas nelayan skala kecil di teluk Ban Don Thailand yang mengatasi keterbatasan mata pencaharian sebagai nelayan dengan menjadi buruh pada industri tiram (Tipyan, dan Mee-udon, 2014)

Keempat modal penghidupan pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas modal finansial yang rapuh (Gambar 5). Lemahnya empat modal melemahkan peningkatan

pendapatan dari kegiatan tangkap, meskipun pada pembahasan modal alam volume hasil tangkapan meningkat, namun akibat tidak Bergeraknya perekonomian local, ditambah dengan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan menyebabkan pendapatan tidak meningkat dan tidak memperkuat basis nafkah melalui investasi peningkatan armada penangkapan dari lepa atau koli-koli menjadi bodi batang dengan mesin tempel. Kondisi penghasilan musim timur yang berlimpah kemudian juga tidak mengurangi kerentanan karena adanya kebiasaan berhutang dan pengeluaran jajan anak yang menyebabkan kerentanan jatuh pada kondisi kemiskinan.



Gambar 5. Keterkaitan Lima Modal penghidupan terhadap Kerentanan Rumahtangga Nelayan Bajo Mantigola

Ketidakstabilan mata pencaharian kemudian mengancam keamanan pangan rumahtangga. Menurut Cruz-Trinidad *et al.*, (2014) bahwa dalam konteks keamanan pangan (*food security*) harus dilihat sebagai kondisi pangan bisa diakses, dan pangan tersedia. Menurut Stacey *et al.*, (2017), dalam melihat ketidakamanan pangan orang Bajo di kawasan Taman Nasional juga harus melihat 3 unsur penting, yakni (1) kapasitas fisik untuk menangkap sumberdaya, peluang alam yang mendukung, dan iklim politik yang mendukung. Berdasarkan hal tersebut, bagi nelayan miskin, kapasitas fisik yang terbatas dengan leppa sehingga hanya bisa "*palilibu*" dan saat musim Barat yang tidak cukup menguntungkan, dan kondisi politik orang darat yang meraginkankan orang Bajo, misalnya derajat penegasan zonasi berdasarkan pada dekatnya wilayah aktivitas industry pariwisata di TNW (Steenbergen, 2013), bagi rumahtangga Bajo menciptakan kondisi ketidakamanan pangan. Sedikit hasil berarti tidak uang untuk membeli beras atau *soami*, peluang ini mendorong rumahtangga terjerat utang yang tidak ada habisnya.

Temuan penting lainnya dari penelitian ini bahwa kerentanan orang Bajo Mantigola tidak dapat dipandang seperti komunitas nelayan lainnya yang mampu beradaptasi kerentanan dengan membangun pola nafkah ganda di luar sector perikanan. Sembiring (2014) menemukan bahwa untuk mengatasi shock dalam bentuk bencana rob di Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, masyarakat nelayan mengembangkan strategi adaptasi rekayasa sumber nafkah dan pola nafkah ganda baik sebagai nelayan kepiting maupun sebagai petani. Demikian juga dengan nelayan Tamasaju di Sulawesi selatan (Vogelij, 2008). Komunitas nelayan bisa bermain dalam ranah nafkah perikanan misalnya sebagai nelayan *pa'orani* dan *pa'lanra*

dan juga pada mata pencaharian sebagai petani padi sawah dan palawija. Kami menemukan bahwa identitas yang kuat sebagai orang Bajo (*Sama*) menimbulkan kerentanan tersendiri.

Terlalu kuatnya identitas sosial pada akhirnya menimbulkan perlawanan diam-diam (misalnya melakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum dengan menggunakan racun rumput, atau pada beberapa kasus yang kami temui ingkar janji melunasi hutang kasoami kepada orang darat) yang akhirnya bisa mencederai ikatan sosial dengan orang darat. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya stigmatisasi terhadap orang Bajo yang tidak bisa dipercaya dan identic dengan perilaku yang merusak lingkungan. Stigmatisasi kemudian menghambat pertukaran ekonomi yang setara antara orang Bajo Mantigola dengan orang darat Kaledupa. Hal ini rupanya juga telah ditekankan oleh Stacey *et al.*, (2018) bahwa orang Bajo menggunakan 4 set dari nilai-nilai yakni mobilitas spasial, penggunaan sumberdaya, otonomi dan identitas, serta hubungan kekerabatan. Temuan Ali Basri *et al.*, (2017) bahwa stigmatisasi terhadap orang Bajo Bungin juga berdampak pada perubahan mentalitas dan semakin marjinalnya nilai-nilai sosial orang Bajo di mata supra-sistem misalnya oleh pemerintah. Selain itu nilai-nilai sosial tersebut mulai memudar di kalangan generasi muda orang Bajo.

Kami meyakini dimensi “identitas” bagi orang Bajo ibarat “dua sisi mata uang”. Pada kasus yang lain misalnya, identitas Bajo *Sama* bisa menjadi keberhasilan diversifikasi nafkah. Cooke (2013) menemukan bahwa symbol identitas Orang Bajau² merupakan “label” yang penting bagi orang Bajo Kaligau di Sabah. Bukan hanya sebagai identitas politik saja namun identitas tersebut bagi orang Bajo Kaligau sebagai pendorong keberhasilan diversifikasi nafkah melalui intervensi budidaya rumput laut.

Pada akhirnya lima modal penghidupan orang Bajo Mantigola tersebut menyebabkan ketidakpastian mata pencaharian. Ketidakpastian mata pencaharian mengancam kemandirian pangan rumahtangga nelayan Bajo Mantigola. Untuk mengatasi kerawanan pangan di saat musim susah mencari ikan (khususnya musim Barat). Untuk beradaptasi dari kondisi rentan ini rumahtangga akan melakukan penghematan, mengganti beras dengan lebih banyak mengkonsumsi soami, subsistensi rumahtangga, dan berhutang baik dengan punggawa di Mantigola dan Mola maupun dengan kios sembako di dalam kampung, dan kerabat (*darapanakan*) di dalam kampung Mantigola. Menurut Kaushik dan Sharma (2015) untuk mengurangi resiko atau kerentanan, kapasitas adaptasi dibangun pada beragam komponen, antara lain kombinasi modal alam, modal sosial, dan modal manusia. Kerentanan yang dialami oleh rumahtangga nelayan Bajo pada akhirnya bisa memicu timbulnya perilaku perikanan illegal yang merusak lingkungan antara lain penggunaan bom, penangkapan diam-diam di wilayah *core zone*, penggunaan sianida dan sebagai kaki tangan perilaku illegal fishing skala internasional yang mengancam kedaulatan negara dan mengancam keberlangsungan sumberdaya perikanan di segitiga karang dunia.

2. Merupakan istilah Bagi orang Bajo di Sabah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bagian tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tipologi dari lima modal penghidupan (modal alam, modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, dan modal fisik) dan cluster data A,B,C, dan D. Sumber kerentanan dari modal alam adalah ketidakpastian hasil tangkapan khususnya pada musim angin Barat. Dari sisi modal manusia, nelayan Bajo berpendidikan formal sangat rendah sehingga rumahtangga nelayan bajo Mantigola tidak bisa memperluas mata pencaharian selain kegiatan perikanan tangkap. Dari sisi modal sosial, Modal sosial, rumahtangga nelayan Bajo relatif lebih rentan ketika terkait dengan interaksi dengan orang darat, khususnya orang darat Kaledupa yang tidak memberikan peluang bagi berkembangnya perekonomian di Kampung Mantigola. Dari sisi modal fisik, Kampung Bajo Mantigola rendah dalam fasilitas ekonomi antara lain pasar, yang semestinya menjadi katalisator perkembangan ekonomi di kampung Bajo Mantigola. Kondisi keempat modal ini akhirnya menghasilkan kerentanan pada modal ekonomi. Pendapatan rendah di musim Angin Barat, rentan dengan jebakan Utang, sikap konsumtif (rokok dan jajanan anak-anak), kurang alternative nafkah selain menangkap ikan. Kerentanan yang dialami oleh rumahtangga nelayan Bajo pada akhirnya bisa memicu timbulnya perilaku perikanan illegal yang merusak lingkungan.

Saran

Melihat besarnya derajat kerentanan masyarakat Bajo Mantigola dan bersumber bukan pada kebijakan taman nasional saja, namun bersifat multidimensional (nampak pada kerentanan di lima modal penghidupan) maka penelitian ini menyarankan kepada khususnya pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (NGO's) untuk berkolaborasi menghasilkan kebijakan spesifik masyarakat Bajo dengan mempertimbangkan konteks lokal, dan dinamika sosial politik. Hal ini peneliti anggap mendesak dan harus segera dilakukan karena adanya kebijakan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) untuk wilayah Kabupaten Wakatobi yang akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Bajo khususnya Bajo Mantigola yang dominan hidup dekat dengan batas subsistensi.

Dari sisi temuan teori, kami menyarankan dalam studi kerentanan orang Bajo, dimensi identitas harus menjadi perhatian kaitannya dengan sistem nafkah orang Bajo. Identitas yang kami maksud merujuk pada penegasan inklusifitas orang Bajo sehingga menghambat proses sosial disosiatif antara orang Bajo (*Sama*) dengan orang darat (*Bagai*).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI sebagai penyandang dana kegiatan penelitian kerentanan masyarakat Bajo Mantigola melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Rasa terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Andrew

McWilliam dari Western Sydney University yang telah memberikan kesempatan kepada ketua tim peneliti bergabung dan belajar dalam penelitian perlindungan sosial orang Bajo di Soropia Sulawesi Tenggara pada Tahun 2016, dan orang Bajo Saponda Sulawesi Tenggara pada Tahun 2017. Ide penelitian ini muncul dari keterlibatan ketua tim peneliti dalam penelitian tersebut. Tim mahasiswa yang membantu kami mencari fakta penuh makna di Bajo Mantigola: (1) Siti Zalmina; (2) Dita Septiani Kamal; (3) Usti, terima kasih atas kerja keras bersama. Pada akhirnya, kami menyampaikan rasa terima kasih kami yang tidak terhingga khususnya kepada masyarakat Bajo Mantigola di Kaledupa yang telah bersedia menerima kami untuk mempelajari kerentanan hidupnya meskipun kami harus menghadapi prasangka dari mereka terkait kami yang dianggap sebagai jagawana dari Taman Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. 2010. *Analisis Kerentanan dan Determinan Kemiskinan berdasarkan Karakteristik Wilayah di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB. Disertasi.
- Ali Basri, L., Mudana, I, W., Rahman, A. 2017. *The Negative Stigma against the Bajo Tribe and Its Impact on Local Culture: Study of the Bajo Tribe in Bungin Village of South Konawe*. Asian Culture and History, Vol. 9, No. 2, pp: 90-95.
- Chambers, R., and G. Conway. 1991. *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. IDS Discussion Paper 296. Brighton: Institute of Development Studies.
- Chou, C.G. 1994. *Money, Magic and Fear: Identity and Exchange Amongst The Orang Suku Laut (Sea Nomads) and Other Groups of Riau and Batam, Indonesia*. Thesis of The Degree of Philosophy Department of Social Anthropology, University of Cambridge.
- Clifton, J., and Majors. 2012. *Culture, Conservation, and Conflict: Perspective on Marine Protection Among The Bajau of Southeast Asia*. Society and Natural Resources: An International Journal, 25: 716-725.
- Cruz-Trinidad, A., Alino, P.M., Geronimo, R.C. and Cabral, R.B. 2014. *Linking Food Security with Coral Reefs and Fisheries in the Coral Triangle*. Coastal Management, 42(2): 160-182.
- Badjeck, M.C., Allison, E.H., Halls, A.S, Dulvy, N.K. 2010. *Impacts of Climate Variability and Change on fishery-based livelihoods*. Marine Policy 34(2010): 375–383.
- Damanik, R., Prasetiamartati, B., dan Satria, A. 2006. *Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan*. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI): Jakarta.
- Darling, E.S. 2014. *Assesing the Effect of Marine Reserves on Household Food Security in Kenyan Coral Reef Fishing Communities*. PloS ONE,9(11):e113614.doi:10.1371/journal.pone.0113614. pp:1-20.
- Dharmawan, A.H. 2007. *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) mahzab Barat dan Mahzab Bogor*. Sodality, Vol. 01, No.2, pp: 169-192.
- Ellis, F. 1998. *Household strategies and rural livelihood diversification*. The Journal of Development Studies 35 (1): 1–38.
- Ellis, F. 2000. *Rural livelihoods and Diversity in Developing Countries*. New York: Oxford University.
- Faraco, L.F.D., Andriquetto-Filho, J.M., Lana, P.C. 2010. *A methodology for assessing the vulnerability of mangroves and fisherfolk to climate change*. Pan-American Journal of Aquatic Sciences (2010), 5(2): 205-223.
- Ferrol-Schulte, D., Gorriza, P., Baitoningsih, W, Adhuri, D.S., Sebastian, C.A., Fersea. 2015. *Coastal Livelihood Vulnerability to Marine Resources Degradation: A Review of The Indonesian National Coastal and Marine Policy Framework*. Marine Policy Journal, Vol.52 (2) 2015. pp: 163-171.
- Füssel, H.M., 2010. *Review and quantitative analysis of indices of climate change exposure, adaptive capacity, sensitivity, and impacts*. Background note to the world development report, World Bank, Washington, DC. (34 pages).
- Kamal, D.S. 2017. *Studi tentang Mata Pencaharian pada Tipe Keluarga Nelayan Bajo di Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi*. Skripsi. Jurusan /P.S. Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo.
- Kaushik, G., and Sharma, K.C. 2015. *Climate Change and Rural Livelihoods-Adaptation And Vulnerability In Rajasthan*. Global NEST Journal, 17 (1): 41-49.
- Moeliono, M., Limberg, G., Minnigh P., Mulyana A., Indriatmoko Y., Utomo, N.A., Saparuddin., Hamzah, Iwan R., Purwanto, E. 2010. *Meretas Kebuntuan: Konsep dan Panduan Pengembangan Zona Khusus bagi Taman Nasional di Indonesia*. Center For International Forestry Research (CIFOR).
- Monirul Islam, Md. Sallu, S., Hubacek, K., Paavola, J. 2014. *Vulnerability of fishery-based livelihoods to the impacts of climate variability and change: insights from coastal Bangladesh*. Reg Environ Change (2014) 14:281–294.
- Paldam, M. 2009. *The Macro Perspective on Generalized Trust*. In Svendsen G., T. and Svendsen, G.L.H (Editor). 2009. *Handbook of Social Capital The Troika of Sociology, Political Science and Economics*. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
- Rayhan, Md.I and Philip, D. 2004. *“Vulnerability and Poverty : What are The Causes and How are They Related?”*. Term Paper for Interdisciplinary Course. Bonn : International Doctoral Studies Program at ZEF Bonn.
- Sembiring, S.T., 2014. *Resiliensi Nafkah Rumahtangga Petani di Kawasan Rawan Bencana Rob Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap*. Sodality, Vol. 02, No. 01, April 2014, pp: 33-46.
- Scott, J. 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. Yale University Press, Ltd, New Haven and London.
- Sibirian, R., dan Haba, J (Editor). 2016. *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Stacey, N.E., Karam, J., Meekan, G.M., Pickering, S., and Ninef, J. 2012. *Prospects for Whale Shark Conservation in Eastern Indonesia through Bajo Traditional Ecological Knowledge and Community-*

- Based Monitoring*. Conservation and Society 10(1): 63-75.
- Stacey, N.E., Acciaoli, G., Clifton, J., and Steenbergen, D.J. 2017. *Impacts of Marine Protected Areas on Livelihood and Food Security of the Bajau as an Indigenous Migratory People in Maritime Southeast Asia*. In *Marine Protected Areas: Interactions with Fishery Livelihoods and Food Security*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper (603 Series): 113-126.
- Stacey, N.E., Steenbergen, D.J., Clifton, J., and Acciaoli, G. 2018. *Understanding Social Wellbeing and Values of Small-Scale Fisheries amongst the Sama-Bajau of Archipelagic South-east Asia* in D.S. Johnson et al (eds.), *Social Wellbeing and the values of Small-scale Fisheries*, MARE Publication Series 17. pp: 97-123.
- Steenbergen, D.J. 2013. *The Role of Tourism in Addressing Illegal Fishing: The Case of a Dive Operator in Indonesia*. Contemporary South-east Asia, 35 (2): 188-214.
- Tadjuddah, M. 2016. *Perikanan Kerapu Dimensi Pemanfaatan yang Berkelanjutan di Taman Nasional Wakatobi*. IPB Press: Bogor.
- Tipyan, C., and Mee-Udon, F. 2014. *Dynamic Livelihood Strategies of Fishery Communities In Ban Don Bay, Suratthani, Thailand*. International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(11): 1126-1138.
- Turner, M. 2007. *Small-Scale Enterprise Livelihoods and Social Capital in Eastern Indonesia: Ethnic Embeddedness and Exclusion*. The Professional Geographer, 59(4) 2007, pages 407–420.
- Vincent—Akpu, I.F., and Annor-Frempong, F. 2017. *Social vulnerability of small scale coastal fisher's livelihood to climate change*. Int. J. Hum. Capital Urban Manage, 2(3): 171-180.
- Vogelij, R. 2008. *The Asian Crisis, Livelihood Conditions, and Resource Use in the Coastal Village of Tamasaju, South Sulawesi* in *Rural Livelihoods, Resources and Coping with Crisis in Indonesia* (Editor: Milan J. Titus and P.M. Burgers). Amsterdam University Press, pp: 257-276.
- Weeratunge, N., Snyder, K.A., dan Chou, P.S. 2010. *Gleaner, Fisher, Trader, Processor: Understanding Gendered Employment in Fisheries Aquaculture*. Fish and Fisheries, 11: 405-420.
- Wianti, N.I., Dharmawan A.H., Kinseng, R., dan Wigna W. 2012. *Kapitalisme Lokal Suku Bajo*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 2012(4): 36-56.
- Wianti, N.I., Suriana, La Ola, T. 2017a. *Struktur dan Strategi Mata Pencarian: Refleksi Kemiskinan Nelayan Bajo di Taman Nasional Wakatobi*. Disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian UGM, Yogyakarta, 29 Juli 2017. Paper Submitted on Jurnal Agro Ekonomi (<http://jurnal.ugm.ac.id/jae>).
- Wianti, N.I., Suriana, La Ola, T., Tadjuddah, M. 2017b. *Palilibu and Pongka: Livelihood Dynamics of Bajo Mantigola Households in Wakatobi Marine National Park*. Paper presented on The 1st International Seminar on Sustainability in the Marine Fisheries Sector 2017: Establishing Sustainable Marine and Fisheries Sector to Support Food Security within ASEAN Economic